

RANCANGAN

RISALAH RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : V
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/tanggal : Senin, 4 Juni 2018.
Waktu : Pukul 14.30 – 15.40 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Ketua Rapat : H.Desmond J Mahesa, S.H., MH /Wkl Ketua Komisi III DPR RI.
Sekretaris : Dra. Tri Budi Utami, M.Si/Kabag Set.Komisi III DPR RI.

KETUA RAPAT (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H./F-GERINDRA):

Ini calon Menkumham baru ini. Kita minta bernafas dulu beliau.
Kita mulai ya.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.30 WIB)

***Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.***

Syukur *Alhamdulillah* hari ini kita bisa bertemu dalam rangka rapat anggaran.

Sekarang Jam tiga kurang. Kita selesaikan Jam 16.30 ya paling lama. *Oh* Jam 16.00, puasa. Bagaimana Jam 16.00, Bapak-bapak? Pak Menteri?

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum Pak Menteri. Yang pertama adalah tentunya komisi minta ada gambaran tentang apa yang telah terjadi dengan anggaran di tahun 2018. Tentunya dasar penyusunan anggaran kegiatan selanjutnya di 2019 acuan dasarnya kan evaluasi itu, apa yang sudah terselesaikan, apa yang belum, bagaimana itu semua problem-problemnya. Tentunya dengan kebutuhan selanjutnya adalah anggarannya, ada tidak yang berlanjut, Karena persoalan ini adalah akhirnya berdampak pada perencanaan.

Yang kedua adalah gambaran anggaran yang sudah berkaitan dengan materi, gambaran anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu berapa anggarannya, walaupun di sini sudah jelas tapi ini ada media, tapi juga berapa yang disetujui, berapa yang masih diharapkan dalam konteks lobi-lobi di Kementerian

Keuangan dan Bappenas, termasuk ini adalah catatan kami di Komisi III. Tentunya ini sangat penting bagi kami di Komisi III untuk membicarakan di Banggar besar dan tentunya juga rapat dengan pemerintah ke depan. Catatan inilah yang menurut saya jadi penting sebagai arah rapat kita hari ini. Untuk itu kami persilakan ke Menteri Hukum dan HAM untuk memaparkannya.

Silakan, Pak.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI (YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.):

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.***

Bapak Pimpinan semua, para Anggota,

Terima kasih atas undangan yang dimintakan kepada kami untuk rapat RKAKL ini. Ini menjadi sangat penting karena dalam beberapa waktu ke depan pemerintah akan menyampaikan nota keuangan dan kami juga meminta bantuan dari Komisi III tentunya untuk mendukung rencana kerja yang ada di Kementerian Hukum dan HAM sebagai mitra kerja dari Komisi III.

Apa yang disampaikan Pak Ketua benar, kalau pada saat ini memang serapan anggaran kita untuk 2018 cukup baik. Per sekarang ini berapa persen, Pak Ketua? 37% dan ini bulan 5, bulan 6 kita harapkan bisa terpenuhi 48%. Jadi kekurangan sedikit. Jadi serapan kita cukup baik. Seperti kita lihat dari belanja pegawai ini yang realisasinya sudah 2,5, belanja barang juga 1,4, belanja modal masih 0. Biasanya belanja modal karena proses tender dan lain-lain belum, nanti baru penghujung itu sekaligus disampaikan. Pada umumnya akan keluar pada waktu akhir-akhir masa anggaran kita. Kalau dari sumber dana rupiah murninya 3,6 saat ini realisasi, 42% ya. PNBPN masih di bawah sampai saat ini, kita harapkan bisa. Hibah luar negeri, dalam negeri tidak ada.

Next, pagu indikatif seperti yang kita inginkan dalam surat kami kepada Menteri Keuangan kita menginginkan 16 triliun, yang disetujui pagu indikatif dari surat Menkeu dan Menpan 11,8 atau 11,9 ini, 11,898 triliun. Jadi masih kekurangan. Kalau kita melihat karena terjadi penambahan pegawai yang cukup besar pada tahun lalu 17.528, maka kita masih kekurangan gaji pegawai dan Tunker dan juga termasuk BAMA. Sekarang ini BAMA itu kekurangannya nantinya sekarang sudah 250. Tahun 2018 yang dianggarkan untuk 180.000 orang. Jadi ada peningkatan 70.000. Ini betul-betul setiap tahun seperti Komisi III pasti tahu benar sejak dulu persoalan kita adalah terjadinya penambahan tahanan dan Napi itu jauh melebihi dari target yang kita sampaikan. Karena dalam penyusunan anggaran selalu mengusulkan dana BAMA itu adalah jumlah *existing* pada akhir tahun. Pada akhir tahun kita sampaikan untuk permohonannya. Jadi kalau misalnya kita ajukan sekarang anggaran untuk 2019 tentunya kita memakai angka 250.000. Ternyata nanti di penghujung pertengahan tahun mungkin sudah 300.000. Jadi selalu ada kekurangan untuk BAMA, Pak Ketua. Ini penyebarannya untuk yang kita sampaikan PNBPN dari segi pendapatan 1,6 triliun yang sudah terserap ini ya, belanja non operasional 461,4 triliun, BAMA 1,2 triliun, belanja operasional 1,08 triliun, belanja pegawai yang cukup lumayan 6,4 triliun, berarti 54% dari total anggaran yang ada. Kalau kita bandingkan jenis belanja antara pagu alokasi anggaran 2018 dan pagu indikatif 2019 perbedaannya hanya kenaikan 1,3 triliun, padahal ada penambahan jumlah pegawai

yang signifikan untuk kita. Jadi ini kami sangat berharap jadi 17.500 lebih pegawai ini sekarang yang penambahannya, baik belanja pegawainya maupun belanja operasional perkantornya tentu membutuhkan perhatian. Rincian untuk pagu indikatif 2019 rinciannya untuk masing-masing unit eselon I dapat kita lihat di tabel ini semuanya berjumlah 11,8. Yang terbesar itu ada di Dirjen Pemasyarakatan 5,1, di Sekretaris Jenderal 3,6, kemudian di Imigrasi 2,08 T. Jadi jumlahnya semua 11,8. Di Dirjen Pemasyarakatan BAMA yang dialokasikan itu hanya 1,266. Ini diprediksi akan terjadi kekurangan yang cukup lumayan nantinya, Pak Ketua.

Untuk program prioritas nasional ada 5 (lima) yaitu:

1. Program pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yaitu 9,8 miliar yang terdiri dari diklat berbasis kompetensi untuk pemasyarakatan dan diklat berbasis kompetensi untuk pelatihan terpadu aparat penegak hukum;
2. Program administrasi hukum umum yaitu kebijakan peningkatan layanan dalam mendorong transparansi kepemilikan manfaat ada 2,5 miliar;
3. Program pembinaan penyelenggaraan pemasyarakatan ada 729 miliar dukungan SPPT berbasis TI 241 miliar, pembangunan rehabilitasi renovasi UPT pemasyarakatan dalam rangka penanganan over kapasitas 152 miliar, pembangunan rehabilitasi renovasi UPT pemasyarakatan dalam rangka penanganan over kapasitas 335, pembimbingan masyarakat mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak 900 juta. Namun demikian memang saat ini kita juga sedang..., karena adanya keinginan untuk menambah pembangunan Lapas *super maximum security*, kita masih memerlukan tambahan anggaran untuk ini.
4. Program pemajuan HAM 500 juta;
5. Program pembinaan hukum nasional 56,3 miliar.

Jumlahnya semua 798 miliar.

Kebutuhan yang belum tertampung ada sebanyak..., belanja operasional sebanyak 8,8 T dan belanja non operasional sebesar 2,4 T, sehingga kekurangan anggaran ada 2,4 triliun dengan perincian sebagaimana tersebut dalam tabel di atas.

Saya kira ini beberapa rincian yang ingin kami sampaikan. Satu hal barangkali yang perlu kami sampaikan bahwa memang dari hasil rapat kita dengan beberapa lintas kementerian, khususnya Polri, BNPT, seturut dengan pengesahan RUU Terorisme dan *existing* sekarang yang terjadi diperlukannya Lapas *high risk* untuk *super maximum security* kita memang masih sangat membutuhkan tambahan. Karena kalau sekarang dipindahkannya dari Mako Brimob sebanyak 154 tambah anak itu mengakibatkan Lapas Batu yang seyogyanya kita maksudkan sebagai Lapas khusus untuk bandar narkoba terpaksa tidak bisa kita laksanakan karena untuk menampung Napiter yang dari Mako Brimob ke Nusa Kambangan. Kita saat ini sedang dalam proses pembangunan Lapas *high risk super maximum security* dengan *state of the art high technology* itu di Nusakambangan namanya Lapas Karanganyar kita harapkan bisa selesai, kita harapkan bisa selesai akhir tahun, itu dapat memuat 520 orang *one cell one person* untuk warga binaan Napiter ataupun yang memerlukan penempatan di *high security prison system*.

Saya kira ini catatan tambahan, Pak Ketua.

Terima kasih atas perhatiannya.

KETUA RAPAT:

Ada catatan dari apa yang dipaparkan Pak Menteri adalah dengan anggaran yang usulan enambelas koma sekian itu dengan bayangan pemerintah 11,8 itu masih ada kekurangan hampir 4 triliun. Tentunya dengan penambahan pegawai itu bagian dari alasan itu tidak yang 4 triliun itu?

MENTERI HUKUM DAN HAM RI:

Termasuk, Pak. Termasuk BAMA, termasuk bagian BAMA.

KETUA RAPAT:

Karena catatan Anggota yang kunjungan ke daerah itu ada beberapa catatan, ada 3 (tiga) catatan. Pertama, masalah tunggakan BAMA, ada gedung dan bangunan Lapas, ada pembangunan Kantor Imigrasi beberapa Kanwil. Ini sudah termasuk juga tidak? Karena ini penting. Di catatan Komisi ini yang sebenarnya adalah yang harus direpson. Karena sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) butir C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Undang-Undang MD3 bahwa yang menetapkan anggaran itu adalah Komisi III. Saya mengingatkan itu. Jadi atensi Komisi dalam konteks kunjungan daerah adalah catatan penting. Jadi ini bukan Banggar besar dan bukan Menteri Keuangan, tapi kita berdasarkan resultas-resultas mitra dengan melihat kondisi obyektif keuangan negara. Tolong ini dipahami oleh mitra agar proses ini bukan sesuatu yang sederhana, ini Undang-Undang MD3. Saya ulang, Pasal 98 ayat (2) butir C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, ini satu-kesatuan pemikiran di sini bahwa dalam pandangan mini fraksi dan persetujuan atau tidak terhadap anggaran Kementerian Hukum dan HAM mengacu pada Undang-Undang MD3 Pasal 98 ayat (2) butir C itu adalah jadi panduan. Maka apa yang kita bicarakan rapat pada hari ini adalah catatan penting bagi kita bersama mitra. Begitu ya catatannya, Pak Menteri.

Silakan, Pak.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI:

Benar, Pak Ketua. Dengan pagu seperti ini tentunya Sarpras itu pastilah hanya sedikit yang masuk di pemasyarakatan. Jadi kalau kekurangan 2,4 T yang dari kekurangan anggaran termasuk di dalamnya Sarpras kita itu pembangunan Kanwil, pemenuhan biaya mutasi pegawai dan termasuk kantor imigrasi yang cukup besar. Karena sekarang pelayanan di keimigrasian kita masih ada satu Kanwil yang melayani sampai beberapa kabupaten/kota. Pada saat peningkatan kebutuhan orang mengurus paspor, baik karena keinginan untuk liburan keluar negeri, terlebih-lebih karena umroh, ini tuntutan untuk masyarakat mengurus paspor itu menjadi sangat tinggi sekali. Banyak yang kami lakukan kerja sama dengan beberapa daerah yaitu daerah-daerah membantu kami menyediakan tempat. Tetapi ini tentunya tidak bisa kita bergantung semuanya dan sepenuhnya kepada daerah-daerah. Hanya ada beberapa daerah yang menyediakan gedung kantor kepada kami untuk pelayanan UKK keimigrasian, tetapi selebihnya tentunya kita membutuhkan Sarpras untuk peningkatan-peningkatan pelayanan publik kita di keimigrasian. Jadi benar BAMA juga selalu persoalan

yang berulang dan satu kemarin Lapas di Pekalongan kena *rob*, Ketua. Jadi itu tembok runtuh dan ini menjadi langganan *rob*. Jadi kita berpikir Pemerintah Daerah Pekalongan menyediakan tanah berapa hektar? 11 hektar dan kita berencana memindahkan Lapas itu nantinya ke tanah yang tidak kena *rob*. Karena Pekalongan itu dalam 2 tahun terakhir sudah beberapa kali kena *rob*. Ini, Pak Ketua. Jadi mohon teman-teman dari Komisi III bersama dengan teman di Badan Anggaran untuk mencoba memberikan perhatian tentang kebutuhan anggaran kita, khususnya misalnya yang Pak Ketua di daerah-daerah melihat betul bagaimana beberapa gedung kantor kita yang jauh dari memadai. Bahkan ada Lapas-lapas juga yang seharusnya masih perlu direnovasi. Tapi karena kemampuan anggaran negara terpaksa kita harus membuat skala prioritas mana yang harus kita dahulukan.

Barangkali demikian, Pak Ketua.

Terima kasih atas perhatiannya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Bapak/Ibu Anggota,

Kalau Pak Menteri bicara tolong jangan bicara ya, kita dengarkan. Jadi terganggu kita. Agak lebih disiplin ya, tahu Tata Tertib. Daripada saya tegur.

Bapak/Ibu Anggota,

Sekarang kita per orangan atau per fraksi? Fraksi? Bawah-atas-tengah atau bagaimana? Tengah?

Silakan, PAN. Ada PAN?

F.... (.....):

PAN belum hadir, Ketua.

KETUA RAPAT:

PAN langsung ke atas, PDIP.

F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):

Tidak ada, Ketua.

KETUA RAPAT:

Ini menterinya satu partai. Tidak berani dia, Pak Laoly.

Selanjutnya Hanura. Aman? Kita ke atas, Golkar. Aman juga ini?

F-PG (Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

***Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami hormati,
Bapak Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran,
Pak Sekjen dan Jajaran yang kami hormati,**

Tidak banyak yang akan kami soroti dari Fraksi Partai Golkar. Yang pertama tentunya dari hasil kunjungan kami Komisi III di lapangan sampai saat ini banyak sekali fasilitas-fasilitas daripada Lapas maupun Imigrasi yang mestinya sudah tidak layak pakai, Pak Menteri. Tolong ini mulai diperbaiki hal-hal seperti ini, baik dari komputernya, kemudian fasilitas-fasilitas para pegawai sipir yang menjaga dan juga terkait dengan kelengkapan-kelengkapan transportasi dan lain-lainnya.

Kemudian yang kedua terkait dengan konsumsi untuk para Napi. Makanan para warga binaan ini mungkin sudah mulai ditinjau kembali, Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Adies, ini bicara di rapat lain. Ini Rapat Banggar.

F-PG (Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Ini anggarannya, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ini kita gelondongan, tidak... Saya ingatkan. Ini di rapat yang biasa makronya.

F-PG (Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Baik.

Terkait dengan Lapas ini kami melihat anggaran yang dikururkan tahun lalu terhadap pembangunan Lapas itu tidak dipergunakan secara maksimal dan sekarang untuk 2019 kita lihat diajukan sekitar 335.616 untuk 15 UPT. Apakah ini sudah mencukupi? Tadi Bapak juga menyampaikan akan membuat *high maximum security*, penjara *high maximum security*. Tolong beri kami gambaran *super maximum security* seperti apa. Tadi saya kurang jelas Bapak memberikan paparan, apa yang supernya daripada penjagaan ini? Apakah seperti *art-art* kanvas zaman dulu itu? Dan kami juga belum melihat ada penambahan anggarannya terkait dengan Lapas *high maximum security* yang ada di sini. Jadi mohon kiranya terkait dengan fasilitas, kemudian makanan terhadap warga binaan dan lain-lain, itu mohon diperbaiki terhadap anggaran Lapas di tahun 2019.

Kalau terkait imigrasi nanti di pengawasan yang banyak, Pak. Kalau yang di anggaran mungkin lebih diperhatikan terhadap mereka yang tugas malam itu, jaketnya hanya terbatas masih pimpinan-pimpinan saja, Pak. Kasihan kedinginan itu yang bawah-bawah.

Terima kasih, Pak Menteri.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Adies.
Selanjutnya PKB.

F-PKB (Dr. H.M. ANWAR RACHMAN, S.H., M.H.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Terima kasih, Pimpinan.

**Para Anggota Komisi III yang kami hormati,
Pak Menteri beserta Jajarannya yang kami cintai,**

Kami tidak banyak, hanya memperingatkan. Apakah di Kumham masih ada honorer dan tenaga harian lepas dan apakah untuk tahun ini THR-nya dibayar atau tidak atau mendapatkan THR atau tidak?

Hanya itu saja.
Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Nasdem?

F-NASDEM (Drs. T. TAUFIQULHADI, M.Si.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Pimpinan dan Menkum dan seluruh Jajarannya,

Secara umum kita menganggap bahwa ini sudah tidak ada yang perlu kita persoalkan. Bahkan kita mempertanyakan berapa hal yang turunnya drastis sekali, misalnya program pemajuan HAM. Itu dari kebutuhannya sebenarnya belum tercukupkan sampai 13,4 miliar, kemudian turun menjadi 500. Jadi ini maksudnya bisa ditolerir seperti itu atau tidak?

Yang kedua, masih tetap dengan Lapas. Setelah kejadian yang kemarin di Mako Brimob barangkali ada sebuah upaya untuk bagaimana selain membuat kepastian tentang manajemen dan sebagainya. Barangkali ini kan harus juga dipikirkan, barangkali ada pembangunan yang lain. Dengan anggaran yang seperti ini kalau memang ada sebuah upaya untuk meletakkan persoalan secara jelas nanti siapa manajemennya, apakah ada penambahan anggaran atau tidak terhadap hal tersebut? Kenapa anggarannya? Seperti apakah ini sudah memadai dengan seperti ini?

Saya ingin tanya itu saja. Demikian.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Gerindra? Pak Wenny?

F-GERINDRA (Drs. WENNY WAROUW):

Terima kasih, Pimpinan.

Sebenarnya ingin sekali mendapatkan gambaran yang lebih besar apa yang disampaikan oleh Pimpinan Rapat bagaimana masalah 18 dan bagaimana mengatasinya di 2019, khususnya *overload* daripada Lapas. Harusnya kami mendapatkan gambaran global sampai kapan perencanaan daripada Kumham ini untuk mengatasi ini. Kalau lihat dari anggarannya kecil sekali. Sepertinya tidak melihat secara makro bagaimana mengelola itu, Pak. Tolong diberi gambaran.

Yang kedua masalah PNBK. Ini saya tidak begitu paham bagaimana rencananya. Tapi *kok* ada penurunan. Kalau tidak salah yang paling besar dari imigrasi ya. Tolong diberi penjelasan ini, Pak. Ini di *slide* nomor 4 atau 5.

Demikian, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bisa itu, Pak Wenny.

Selanjutnya PKS.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.):

Terima kasih, Ketua Rapat.

Pimpinan dan Anggota Komisi III, Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati, Menkumham, Pak Yasonna Laoly dan para Jajaran, Pak Dirjen dan Sekjen yang kami hormati,

Ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Ketua Rapat soal penetapan anggaran mitra kerja yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI. Jadi Undang-Undang MD3 secara eksplisit

menyebutkan bahwa penetapan anggaran mitra kerja itu dilakukan oleh komisi terkait, dalam hal ini tentu Komisi III. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, sehingga kemudian bisa bersinergi.

Yang kedua, catatan kedua adalah terkait dengan peristiwa yang ada di Mako Brimob menurut saya dan dalam pandangan kami ini adalah sebuah momentum yang baik bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk mengevaluasi rumah-rumah tahanan atau katakanlah ruang-ruang tahanan yang selama ini ada di Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan sebagainya. Kalau kita misalnya ke Kantor-kantor Polsek itu ada misalnya kita masuk Kantor Polsek kita lihat ruang tahanan, itu terutama kejahatan-kejahatan pidana umum, yang narkoba dan sebagainya, sama sekali mereka itu tidak mendapat pembinaan. Jadi mereka ditahan di situ untuk keperluan proses hukum, penyidikan dan sebagainya. Padahal kan idealnya ketika mereka masuk ke dalam itu mereka sudah mulai dibina dan polisi tidak disiapkan untuk membina itu. Kalau kita tanya dengan petugas di Polsek, mereka hanya makan tidur di situ, tidur-tiduran. Oleh karena itu kalau kita mengunjungi Lapas, maka hampir sebagian besar yang masuk-masuk itu-itu juga, terutama dalam kejahatan-kejahatan pidana umum. Dia-dia juga masuknya. Karena itu memang perlu dievaluasi. Karena apa? Nanti itu terkait dengan beban anggaran dimana kemudian tadi itu, bahan makanan yang bertambah karena bertambahnya jumlah Napi dan tahanan dan sebagainya.

KETUA RAPAT:

Pak Nasir, ini makro saja, Pak. Walaupun itu gambaran saja, wacana saja.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.):

Ini karena terkait dengan Lapas, karena ada renovasi dan sebagainya. Saya pikir ini momentum baik untuk kami menyampaikan persoalan ini, sehingga kemudian menjadi perhatian kita semuanya.

Kemudian yang ketiga ini menyangkut dengan apa yang disampaikan dalam prioritas nasional. Kami menyarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM agar pembinaan masyarakat mengenai pelaksanaan Undang-Undang SPPA Nomor 11 Tahun 2012 ini bisa dimasifkan, dimasifkan di seluruh Kakanwil. Jangan hanya 14 Kakanwil, jangan hanya 14 Kanwil. Karena apa? Karena memang kalau kita mau jujur kejahatan terhadap anak, terutama kejahatan seksual terhadap anak, hampir meningkat semuanya, Pak Menteri. Saya tidak malu *lah*, di Dapil saya, salah satu kota di Dapil saya Banda Aceh yang Aceh disebut dengan serambi Mekah dan sebagainya, kejahatan seksual terhadap anak tahun 2017 itu hampir 600 kasus. Sebenarnya banyak, tapi mereka tidak berani lapor karena takut aib dan sebagainya. Banyak, Pak. Karena itu kami menyarankan barangkali ada pertimbangan dari Kementerian Hukum dan HAM agar pembinaan masyarakat terkait dengan Undang-Undang SPPA ini bisa dilakukan di seluruh Kanwil dalam wi layah Kementerian Hukum dan HAM, sehingga kemudian kita... Tentu saja kami paham, mungkin dalam benak Kementerian Hukum dan HAM ada provinsi-provinsi yang barangkali kejahatan seksual terhadap anak atau

kejahatan terhadap anak itu meningkat. Tetapi kan apa salahnya kalau kita juga lakukan di tempat lain untuk lakukan pencegahan-pencegahan, sehingga kemudian bisa kita atasi. Itu saran kami terkait dengan pembinaan masyarakat mengenai Undang-Undang SPPA.

Yang terakhir tentu anggaran yang diminta oleh Pak Menteri. Saya pikir ini angka 2 triliun tidak banyak-banyak sekali sebenarnya, Ketua. Tidak banyak-banyak sekali *lah* angka ini dibandingkan dengan mitra-mitra kerja lainnya. Saya pikir kami Fraksi PKS berharap agar Komisi III bisa memberikan perhatian terkait dengan kekurangan yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan mudah-mudahan sekali lagi bahwa kita bisa bersinergi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM dengan teman-teman Anggota Komisi III yang juga memiliki kepedulian dengan apa yang bisa kita sama-sama kerjakan dan kerja samakan.

Terima kasih, Ketua.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Demokrat.

F-PD (Ir. MULYADI):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta seluruh Jajarannya,

Sesuai dengan agenda rapat kita pada hari ini adalah pembahasan makro anggaran 2018-2019. Tapi ini kan masih pagu indikatif ya, Pak Menteri. Pagu indikatif ini ceritanya masih panjang ini. Ini untuk persiapan nota keuangan ya, Pak Menteri. Setelah menyampaikan nota keuangan mungkin nanti bisa agak jelas gambarannya. Tapi setidaknya begini Pak Menteri, ini kan sebetulnya tugas Menteri itu adalah membantu presiden. Ini kan bagian dari Renstra Bapak selama 5 tahun. Yang ingin kami tanya apakah pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima nanti terakhir masa akhir pemerintahan itu Renstra sebagai bagian dari penjabaran dari visi-misi Jokowi-JK itu sudah tercapai atau belum, Pak? Di mana *missed*-nya? Itu yang kita perlu, Pak. Kan semua pembantu presiden menjabarkan visi-misi Jokowi-JK, dijabarkan dalam Renstra, Renstra dalam 5 tahun. Tahun anggaran pertama, kedua, ketiga ini sudah masuk anggaran kalau 19 sudah tahun anggaran terakhir. Apalagi sudah masuk 2019. Tolong kami diberi gambaran dimana bagian-bagian tertentu, apa yang sudah menjadi penjabaran dari Bapak itu yang masih belum bisa dipenuhi anggarannya oleh Kementerian Keuangan dan bagaimana solusi dari permasalahan yang sebetulnya sudah menjadi prioritas misalnya oleh presiden namun mengingat anggaran negara kita memang terbatas hal tersebut belum bisa dicapai, sehingga siapapun yang akan

memerintah pada pemerintahan selanjutnya tahu persis bagian-bagian mana yang sudah diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Selanjutnya siapapun presidennya, apakah masih Jokowi-JK atau bukan, tahu persis apa yang harus diselesaikan, seberapa banyak yang belum bisa diselesaikan dari rencana yang sudah dibuat oleh pemerintahan sekarang, Pak. Karena ini masih menyangkut pagu indikatif, mohon kiranya ini pendalamannya menjelang nota keuangan nanti Komisi III diberi data yang lebih lengkap.

Saya rasa itu saja, Pimpinan.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Mul.
Ini calon Menteri Hukum dan HAM ke depan, Pak Menteri.
Selanjutnya PPP. Tidak ada? Oke, ada 9 fraksi, 1 fraksi tidak ada, Pak Menteri.
Kami persilakan untuk menjawabnya. Yang poin penting yang terakhir ini juga agar kita tahu apa yang terjadi selama 4 tahun berjalan ini.
Silakan, Pak Menteri.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI:

Baik. Pertama dari Pak Adies. Pertama dulu terima kasih, Pak Adies. Pak Adies, terima kasih dulu bantuannya untuk komputer di Lapas Sidoarjo. Maksud saya menyampaikan ini biar yang lain-lain mengikuti, Pak.

F-PG (Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Lapas Porong-Sidoarjo dan Rutan Medaeng, Pak. Ada tiga.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI:

Dulu itu Junimart. Junimart kasih itu motor di Sidikalang. Kalau Pak Nasir Djamil diam-diam dia bantu di Aceh. Kita tahu *lah*.

Baik, memang benar Pak Adies bahwa masih banyak fasilitas, baik imigrasi maupun Lapas, yang tidak seperti yang kita harapkan. Semua sebetulnya kembali kepada anggaran. Lebih-lebih kalau di imigrasi, Pak. Pasca PNBK kita yang menurun memang sangat terasa sekali. Maka itu kami siasati dengan bekerja sama dengan daerah-daerah. Beberapa daerah memberikan gedung yang sangat baik buat kami, sehingga kami tinggal menyiapkan perangkat dan pegawai. Bahkan ada daerah-daerah yang memberikan pegawai dan perangkat. Itu kita tinggal latih. Dan daerah itu langsung punya kantor imigrasi. Ada beberapa sekarang daerah yang dalam proses evaluasi tentang hal itu, Pak Ketua. Jadi kalau mengharapkan anggaran kita memang kita belum mampu untuk itu. Tapi kami boleh sampaikan bahwa ini tidak akan mengganggu pelayanan publik kita secara..., kalau boleh kami katakan terlalu signifikan. Hanya

kebijakan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Semakin dekat pelayanan publik ke masyarakat akan semakin baik. Jangankan di luar Jawa, Pak Ketua. Kalau di Kalimantan satu kantor kabupaten itu membawahi tiga kabupaten kalau di Kalimantan jauhnya itu sudah... Di Solo saja satu kota Solo melayani enam kabupaten. Kami sekarang sudah membuat UKK di tempat yang lain. Jadi untuk mendekatkan pelayanan publik, maka ini terus akan menjadi target kami, termasuk bagian dari Renstra, Pak Mulyadi, tentang kantor-kantor imigrasi kita, bagaimana mendekatkan pelayanan publik. Disamping mendekatkan pelayanan publik berupa kantor, kami sedang membangun sekarang strukturisasi, tahun ini akan selesai, sistem komputerisasi daripada IT keimigrasian SIMKIM (Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian) kita, Pak Ketua. Jadi kalau 335 memang tidak cukup, Pak Adies. Makanya kita minta tambahan 1,29. Tadi ditanyakan oleh Pak..., ini untuk apa, bagaimana sebetulnya Lapas *maximum security* yang sedang kita bangun. Kalau diizinkan kami mau..., kondisi sekarang sudah kita bangun..., sejak 2016 kita membangun satu Lapas *super maximum high security* ini tadi di Karanganyar. Itu termasuk *state of the art* mau kita buat. Kalau diizinkan kami putar sebentar supaya pemahaman kita... Silakan.

Izin, Pak Ketua. Hanya 5 menit.

Sudah? Sambil menunggu Pak Ketua, saya jalan. Kalau nanti sudah nanti ini...

Pak Benny..., ini juga menjawab nanti pasca Mako, jadi memang pasca peristiwa Mako kita baru sadar kami jujur saja..., ini sekarang sudah mulai, suara-suara, *voice*. Suaranya tidak ada?

(PEMUTARAN VIDEO)

MENTERI HUKUM DAN HAM RI:

Ini dibangun di atas 25 hektar lahan. Dulunya ini Lapas yang sudah hancur.

SUARA VIDEO REKAMAN:

(Suara tidak jelas) Nusakambangan seluas 25 hektar pada area perbukitan guna memperoleh kondisi topografi yang tepat bagi sistem pengamanan lingkungan lembaga pemasyarakatan. Pada gerbang utama terdapat pintu masuk yang dilengkapi dengan sensor infrared guna mendeteksi barang yang masuk ke dalam Lapas. Pada gedung utama terdapat ruang portir. Di dalam Lapas ini terbagi dalam tiga kelompok bangunan yaitu zona gedung kantor, zona gedung teknis serta zona utama gedung hunian.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI:

Jadi pintunya juga mau masuk ke dalam pakai zigzag. Jadi ada blok-blok.

SUARA VIDEO REKAMAN:

Fasilitas yang terdapat pada gedung hunian terdiri dari karakteristik yang berupa hunian maksimum, medium dan minimum security. Lembaga pemasyarakatan ini

memiliki kapasitas hunian sejumlah 504 narapidana, dilengkapi pula dengan sarana pembinaan yang sesuai dengan assessment risiko yang telah dilakukan kepada tiap-tiap narapidana. Dalam rangka pemenuhan suplai energi lembaga pemasyarakatan ini memanfaatkan tenaga air, angin serta tenaga surya dalam mendukung operasionalnya. Lapas ini dilengkapi dengan pengamanan berlapis berupa pagar anti panjat yang didukung teknologi berbasis IT serta kanal air sebagai area pengamanan sekaligus sebagai sumber tenaga air.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI:

Air ini bisa 4 meter kedalamannya.

SUARA VIDEO REKAMAN:

Kanal air selebar 6 meter dengan kedalaman variabel 4 sampai 12 meter.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI:

Jadi kalau mau taruh buaya bisa, Pak. Itu pendapat Pak Buas bisa kita taruh buaya di situ.

SUARA VIDEO REKAMAN:

Ditempatkan tiga menara sebagai kontrol maupun pos jaga atas yang berfungsi lengkap sebagai bagian dari pengamanan lingkungan menyeluruh dengan peralatan yang berbasis IT antara lain alat pendeteksi gerak tubuh, wajah dan panas tubuh.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI:

Nusakambangan.

SUARA VIDEO REKAMAN:

Guna menyempurnakan seluruh proses pengamanan berbasis teknologi, di sisi luar juga dilengkapi dengan jalan akses kontrol keliling bagi petugas dengan jarak memutar kurang lebih 5 kilometer. Keseluruhan proses pembangunan Lapas ini memerlukan biaya sebesar Rp340 miliar.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI:

Jadi Pak Ketua, ini sudah kita bangun sejak tahun 2016. Anggarannya Rp50 miliar, 2017 Rp50 miliar, tahun ini Rp139 miliar, sekarang sekitar hampir 40%, menuju 40%, IT-nya nanti yang penambahannya. Kemarin waktu kami presentasi di Ratas

presiden setuju untuk segera menambah ini. Kalau boleh sekarang kita menambah Rp220 miliar. Ini betul-betul *state of the art*. Ada *body sensor*, ada... Jadi dalam blok itu semua blok adalah Lapas *super maximum security*. Tetapi di dalam itu ada yang *maximum, medium, minimum*. Jadi ada Napi yang semuanya *super maximum*, tetapi ada yang *super high risk*-nya itu maksudnya yang sangat sangat..., itu nanti kalau sudah dibina boleh pindah ke *minimum*. Tapi semuanya memang di Lapas *super maximum*. Untuk 502 orang, Pak Ketua. *One person one cell* pakai *body sensor, body heat*, kemudian CCTV semuanya, betul-betul, tetapi juga terjamin punya akses HAM. Tapi kuncinya itu fasilitasnya yang membuat dia... Pak Ketua, memang pasca Mako Kapolri..., tapi ditanyakan saja kepada Pak Kapolri, akan membuat juga Rutan *super maximum* di Cikeas, itu urusan Pak Kapolri, dan kita akan menambah satu lagi tetapi tidak seperti ini, terlalu *costly*, cukup seperti Pasir Putih. Penambahan misalnya 100-200 lagi yang *maximum security*. Jadi ini memang sudah kita jadikan dan di Nusakambangan akan dibuat pos TNI. Jadi kita tidak perlu mencari pulau-pulau terluar pos TNI dan kita akan buat lapangan tembak di sana, karena memang pembaretan Kopassus ada di Nusakambangan. Jadi untuk membuat semacam psikologi, kita buat lapangan tembak di sana, sehingga ini mempengaruhi psikologis supaya jangan ada yang lari. Jadi lapangan tembak dibuat di sekitar situ, Pak Ketua. JADI ini barangkali tambahan. Memang memerlukan tambahan biaya yang cukup lumayan, tetapi pada saat yang sama tambahan 1,2 yang kami inginkan ini juga termasuk memperbaiki Lapas-lapas yang misalnya Lapas Yogyakarta, Manado, Kendari, Ambon dan beberapa yang teman-teman dari Komisi III yang pernah..., Pak Soenman, kunjungan. Kami akan perhatikan, Pak Ketua. Jadi memang tadi Pak Warouw mengatakan kenapa *grand design* kita... Memang sepanjang percepatan pertambahan Napi sesuai dengan deret ukur dan pertambahan Lapas sesuai dengan deret hitung, ini tidak akan bisa. Bayangkan tadi untuk 1 tahun saja sudah hampir puluhan ribu yang bertambah. 70 ribu sesudah... Jadi memang ini persoalan, persoalannya narkoba. Kalau kita punya kebijakan misalnya bagaimana mendorong rehabilitasi pengguna..., dan saya sangat berharap revisi Undang-Undang Narkotika ini betul-betul kita perhatikan. Hanya dengan cara ini barangkali paradigma kita ini kita ubah. Kalau tidak kita tidak akan mampu pada saat yang sama membangun gedung dan makan. Uang makan saja dengan menu Rp15.000,- kita sudah Rp1,2 triliun. Ini sekarang jalan terus. Ini sebelum dibangun, Pak. Ini sekarang konsepsi yang tadi. Kita pakai TNI juga. Terus, ini sudah mulai. Ini yang tadi, pembangunan yang tadi.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Menteri. Kalau ini semua digambarkan kan gambaran kegagalan penegakan hukum. Jadi jangan terlena, Kawan-kawan. Ini Komisi III. Kalau ini kan yang digambarkan adalah kegagalan penegakan hukum, kegagalan BNN, kegagalan institusi penegak hukum semuanya. Jadi saya hanya mengingatkan. Ini benar, tapi kita esensinya Komisi III adalah ada persoalan yang sangat penting bagi kita di komisi melihatnya adalah itu kegagalan-kegagalan institusi penegak hukum kita. Itu yang harus kita catat khususnya. Tidak akan ada ini maksimal seperti ini kalau kejahatan tidak ada lagi. Sederhana *kok* caranya. Jadi jangan terlena dalam konteks ini, apapun... Oh ya, kalau anda di Belanda tidak perlu ini. Kapan kita bisa seperti itu. Contoh... Ya

kosong. Ya kan itu, Pak. Jadi kita harus melihat sebuah negara yang lebih sehat, bukan kondisi obyektif hari ini. Inilah tujuan bernegara. Saya ingatkan ini.

Teruskan, Pak Menteri.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI:

Cerdas Pak Ketua kita ini berpikinya. Sepakat, Pak Ketua.

Saya saran, Pak Ketua. Ini Undang-Undang Narkotika. Ini kan paradigma, Pak. Paradigma kita melihat *crime is a social product*. Kejahatan tidak datang *out of the blue*. Dia adalah proses sosial, persoalan masyarakat. Mengapa banyak orang dimasukkan narkoba? Ya itu tadi, persoalan penegakan hukumnya. Harus saya katakan lebih banyak bandar di dalam daripada pemakai. Saya selalu menggambarkan lebih banyak toko daripada pembeli. Ini kan persoalan di mana penegakan hukumnya. Maka barangkali di revisi Undang-Undang Narkotika yang akan datang perlu betul-betul Komisi III... Saya berharap di Komisi III boleh lintas rapat, tapi yang mayoritas Komisi III kalau memang Pansus..., untuk melihat ini jernih. Karena Komisi III yang selalu tahu Lapas, yang tahu bagaimana pembinaan di dalam, untuk melihat perspektif undang-undang ini seperti apa. Salah kita membuat. Kita tidak mampu. Apa yang dikatakan Pak Ketua tidak akan mampu kita membangun Lapas yang untuk 1.000 orang sekitar 150 miliar. Dalam setahun kita menambah bukan 1.000, berapa ribu orang masuk ke dalam. Itu berbicara *net*, Pak Ketua. *I'm talking about net*. Artinya setelah kita keluarkan remisi, kita berbicara *net*. *Reform* tentang peraturan-peraturan tentang bagaimana hak-hak Napi, perlukah mereka mendapat remisi, ini juga satu soal. Apa yang dikatakan Pak Ketua ini adalah masalah serius. Artinya kalau kita tidak membuat dia remisi berarti yang masuk *segini*, yang keluar *segini*, (suara tidak jelas), kita kolaps. Kita masih tetap membahas angka uang makan Rp15.000,-. Kalau kita tambah untuk sesuai dengan HAM Rp30.000,-, itu berarti lompatannya sekian. Lebih bagus kita bangun jalan tol. Jadi ini beban kita bersama. Barangkali kita nanti duduk bersama dalam jumlah kecil tingkat BNN, Polri, Kemenkumham, kita duduk untuk melihat perspektifnya secara baik. Supaya memang demikianlah halnya. Di negara-negara yang sudah maju Lapasnya makan keju, ada TV, ada kulkas, ada roti yang sangat nikmat, tapi kosong, karena memang *crime* tidak di-*produce* dalam itu. Hukum juga bisa menimbulkan. Kalau kita sekarang kriminalisasi semua, masuk semua, *ya* tidak mampu kita.

Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua saya sependapat, Pak Ketua. Apalagi mau lebaran ini, banyak tangkapan, Pak Ketua. Ini soal baru ini. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, itu pengamanan lebaran saja. Jadi Pak Warouw dan teman-teman, memang ada soal bagaimana mengatasi *over* kapasitas. *Grand design* sudah kita buat. Tetapi kalau *source*-nya ini tidak kita perbaharui di bawah, harus ada yang *balance*. Saya mengapresiasi Komisi III dengan Rencana Undang-Undang Hukum Pidana yang *restorative justice*. Jangan semua kita masukkan ke dalam. Barangkali ini juga konsep terobosan yang kita sepakati bersama, mengurangi masuk orang ke Lapas. Ini satu terobosan yang barangkali menjadi masukan buat kita. Dari PNBPN menurun saya sudah jelaskan tadi memang terjadi penurunan di Imigrasi, yang kemarin itu, Pak Ketua. Kalau yang lain-lain cukup baik, mudah-mudahan nanti akan baik. Jadi nanti kita harapkan Undang-Undang PNBPN yang akan datang bisa akan lebih baik, sehingga *sharing* diantara Direktorat Jenderal. Benar bahwa...

KETUA RAPAT:

Pak Menteri, sebentar saya ingatkan. *Problem*-nya kan masalah bebas visa. Iya ka? Dulu kesimpulan rapat kita adalah Komisi III mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk membicarakan ini. Ini juga nanti harus di forum yang lain dijelaskan ini.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI:

Sudah kita minta di Kemenpolhukham. Nanti barangkali benar di forum yang lain saja kita bicarakan. Saya setuju, Pak Nasir, momentum yang baik untuk mengevaluasi ruang-ruang tahanan. Pak Nasir tadi sampaikan masih banyak soal-soal di tempat-tempat tahanan yang lain yang tidak bisa sebetulnya kami jangkau. Kami perlu sampaikan yang terjadi di Mako itu kami juga kaget jumlahnya segitu banyak. Dan kita kan..., memang namanya cabang Rutan..., tetapi yang mengelola tetap MoU-nya adalah Densus, yang mengelola tetap Densus. Kekerasan seksual terhadap anak pembinaan tentang sistem peradilan pidana anak memang ini sedang dalam perancangan kita. Jadi di tahun 2019 ada 14 Kanwil. Yang lain-lain tetap kita jalankan, Pak Ketua. Setuju memang ada persoalan di beberapa daerah kekerasan seksual terhadap anak. Ini ada peningkatan di beberapa daerah tertentu. Untuk itu kami terima kasih atas dukungan dari Komisi III untuk mendukung kami di Kementerian Hukum dan HAM melakukan penambahan anggaran.

Seperti yang saya katakan tadi Pak Mulyadi, karena bagian terbesar dari Kementerian Hukum dan HAM adalah Lapas. Di pembinaan, hukum, di keimigrasian, kecuali soal PNBPN, pelayanan kita cukup baik, mendapat penghargaan dari mana, AHU apalagi, kita semua sedang meningkatkan pelayanan publik, tapi di Lapas memang masih persoalan... Itulah residu-residu persoalan yang saya katakan tadi. Jadi harus ada memang mengontrol jumlah masuk ke Lapas perbaikan hukum, yang kedua penataan regulasi tentang remisi. Saya sudah menyampaikan..., mungkin Pak Ketua tahu bahwa kami terus berjuang dan itu keputusan Komisi III tentang revisi PP 99. Ini sudah kita selesaikan, tapi sampai sekarang masih belum selesai.

KETUA RAPAT:

Waktunya sudah lewat.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI:

Oke, baiklah. Jadi sekali lagi kami sampaikan nanti mungkin di Raker yang lebih tepat kami sampaikan ini, karena soal anggaran ini memang sangat penting buat kami dan merupakan prosedur formal yang harus kita sepakati bersama untuk bagaimana Komisi III dapat menyetujui RKAKL dan rencana anggaran yang dapat kita sampaikan ke Komisi III untuk dapat persetujuannya.

Terima kasih atas perhatiannya, Pak Ketua.

***Wallaahul Muwafiq Illa Aqwamith Thoriq,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dengan catatan bahwa ini adalah bagian dari catatan nota keuangan pemerintah nanti.

Selanjutnya kita tayangkan kesimpulan, sementara sebenarnya, kesimpulan sementara rapat hari ini. Yang belum dapat siklus minta fotokopi nanti ya, agar tahapan pembahasan anggarannya teman-teman siapkan. Ini siklusnya ya, agar paham ya. Tolong siklusnya dilihat agar semua orang mempersiapkan pada level tahapan-tahapannya agar kita bilanganya jangan,"*Wong* harusnya sudah selesai ke belakang lagi", begitu ya.

Terima kasih.

INTERUPSI F-PD (Ir. H. MULYADI):

Ketua, kalau bisa kesimpulannya Komisi III perlu mendalami apa yang sudah disampaikan.

KETUA RAPAT:

Itu juga bagian mendalami.

F-PD (Ir. H. MULYADI):

Karena ini kan masih panjang. Nota keuangan masih Agustus. Ini Pak Menteri juga mantan Pimpinan Banggar, tahu persis.

INTERUPSI F-PG (Drs. H. KAHAR MUZAKIR):

Usul, Pak Ketua. Kata *menerima* mungkin diganti *dapat memahami*, Pak. Ini kan masih sangat awal. Menerima itu sudah di ujung. *Dapat memahami penjelasan Menteri Kumham*.

Sebentar, Pak. Kalau yang 16 miliar itu bukan menyetujui. Komisi III meminta Badan Anggaran kita untuk memperjuangkan justru, Badan Anggaran kita di Badan Anggaran besar itu memperjuangkan kebutuhan Kementerian Kumham. *Komisi III meminta agar memperjuangkan*. Kan kebutuhannya 16 triliun, sementara hanya 11 di pagu indikatif. Kita sepakat untuk memperjuangkan sampai 16 atau 11? Itu dulu sikapnya.

KETUA RAPAT:

Pasal 98 ayat (2) huruf c itu anggaran kementerian/lembaga itu ditetapkan oleh komisi yang menjadi pasangan kerjanya, bukan ditetapkan oleh Badan Anggaran. Badang Anggaran itu hanya melakukan sinkronisasi saja sepanjang tidak cukup

keuangan negara yang akan membiayai seluruh kementerian/lembaga. Jadi makanya putusannya memang di sini, Pak.

INTERUPSI F-PD (Ir. H. MULYADI):

Saya mau terima kasih ke Pak Kahar sekarang, karena beliau sudah tidak Pimpinan Banggar. Tapi 8 tahun pengalaman kita, semua yang kita buat di komisi selalu diubah oleh Badan Anggaran besar, Pak. Pengalaman kita, Pak. *Alhamdulillah* sekarang kalau bisa begitu lebih bagus. Tapi prakteknya jangankan anggaran, *cost recovery* saja diubah oleh Banggar waktu saya Pimpinan Komisi VII, Pak. Sudah kita protes ke Pimpinan DPR tidak bisa apa-apa, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Apapun ini yang melanggar MD3 itu kita atau Banggar besar nanti kita uji ya. Catatan kita ya. Ketua Komisi III itu dari Golkar. Pak Mul, Ketua Komisi III dari Golkar. Ketua Banggar dari Golkar. Tinggal fraksi yang lain mensupport Pimpinan Komisi III, itu saja. Setuju ya, Pak Menteri? Oke. Pak Menteri, semuanya setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Dengan demikian rapat hari ini cukup sampai di sini. Atas perhatian Bapak/Ibu semuanya dan Pak Menteri saya ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.45 WIB)